

# ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Ria Darmayanti <sup>1)</sup>

Y. Djoko Suseno <sup>2)</sup>

Suprihatmi Sri Wardiningsih <sup>3)</sup>

<sup>1, 2, 3)</sup> Program Studi Magister Manajemen Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: <sup>1)</sup> riadarmayantird@gmail.com

<sup>2)</sup> jokosuseno7@gmail.com

<sup>3)</sup> suprihatmi60@gmail.com

## ABSTRACT

*The study aims to analyze the influence of budget participation, budget target clarity, accounting control, reporting system, decentralisation, functional supervision and organisation culture to ward the local governments financial performance accountability of Karanganyar. Testing hypothesis in this research use the regression analysis with t test, F test and determination coefficient ( $R^2$ ). The population in this study is the structural employees of regional work unit in Karanganyar. The sampling method is multistage sampling. The study contains 22 regional work units as a sample. The result of this research are budget participation is not influencing the financial performance accountability, budget targets clarity is giving significant influence to the financial performance accountability, the accounting control is giving significant influence to the financial performance accountability, the reporting system is not influencing the financial performance accountability, desentralisation is not influencing the financial performance accountability, functional supervision is giving significant influence to the financial performance accountability and organisation culture is giving significant influence to the financial performance accountability.*

**Keywords:** *financial performance accountability, budget participation, budget target clarity, accounting control, reporting system, decentralisation, functional supervision, organisation culture*

## PENDAHULUAN

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan

(*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu pemerintahan.

Akuntabilitas kinerja keuangan adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik, untuk menggunakan uang publik (*publik money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama masyarakat. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas finansial. Manfaat utama akuntansi adalah pada pemberian informasi. Informasi merupakan bahan dasar untuk proses pengambilan keputusan untuk menghasilkan produk berupa keputusan. Informasi akuntansi dibedakan menjadi dua yaitu (1) informasi akuntansi keuangan yang berbentuk laporan keuangan ditujukan kepada pihak ekstern dan (2) informasi akuntansi manajemen yang digunakan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks organisasi sektor publik, keputusan yang diambil harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik terutama terkait dengan akuntabilitas kebijakan. Oleh karena itu, kualitas informasi berupa keakuratan, transparansi, ketepatan waktu, validitas, relevansi dan keandalan informasi akan sangat mempengaruhi kualitas keputusan dan akuntabilitas publik. Penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja keuangan, tujuh di antaranya adalah partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya

organisasi. Menurut Kennis (2009) "partisipasi anggaran adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan". Oleh karena manajer tingkat bawah yang membuat anggaran, tujuan anggaran tampaknya akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer, yang menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Peningkatan tanggung jawab dan tantangan yang *intern* dalam proses tersebut memberikan insentif non-uang yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi. Anggaran yang akan digunakan sebagaimana mestinya akan menjadi alat pembantu yang positif dalam menetapkan standar prestasi kerja, dalam mendorong tercapainya sasaran, dalam mengukur hasil, dan dalam mengarahkan perhatian pada bidang yang memerlukan penyelidikan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengindikasikan terjadinya *research gap* pada penelitian ini, di antaranya penelitian Bangun (2009) dan Mbon (2014) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun penelitian Retnaningtyas (2016) mengatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian Wahyuni, dkk (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial SKPD, namun penelitian Anjarwati (2012), Hidayattullah dan Herdjiono (2014), Wahyuni dkk (2012) dan Retnaningtyas (2016) mengatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam penelitian Anjarwati (2012), Wahyuni dkk (2012), Cefrida dkk (2014) dan Retnaningtyas (2016) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

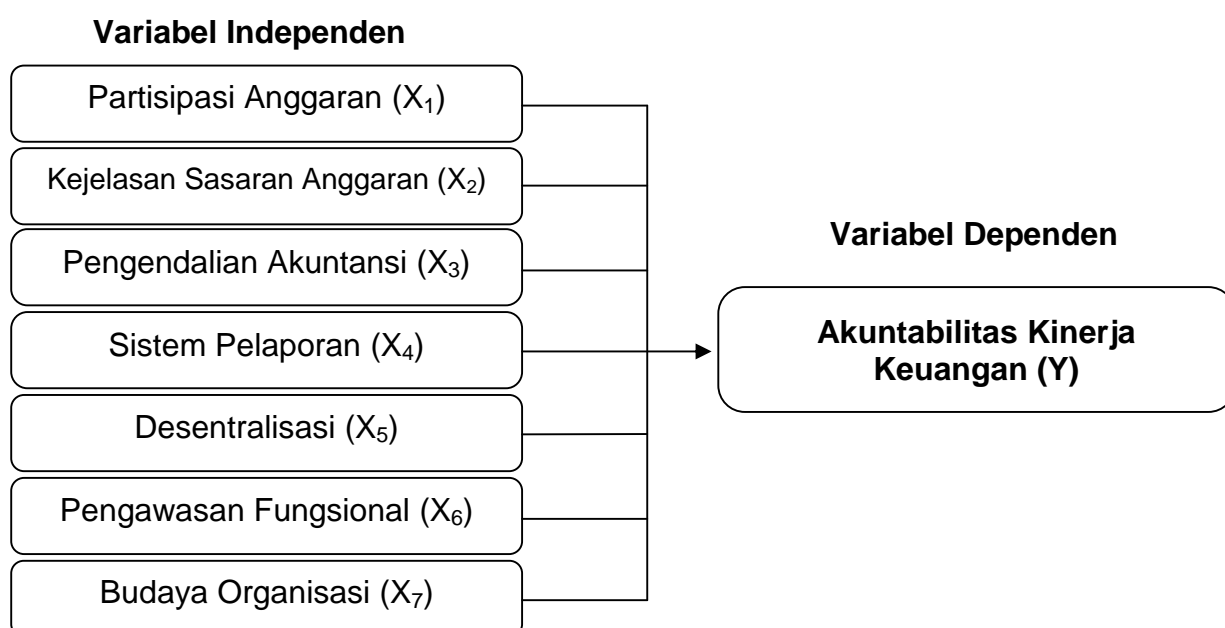
instansi pemerintah, namun penelitian Hidayattullah dan Herdjiono(2014) dan Yulianti dkk (2014) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam penelitian Anjarwati (2012) dan Retnaningtyas (2016) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan, namun dalam penelitian Risma (2009) menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan.

Dalam penelitian Bangun (2009), Suwandi (2013), Wahyuni dkk (2014) dan Retnaningtyas (2016) menguji tentang pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan hasil menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan. Wulandari (2013) dan Retnaningtyas (2016) menguji tentang pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota Padang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Dalam penelitian Kusumawati (2014) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi

berpengaruh terhadap kinerja pegawai, namun dalam penelitian Kurniawan dan Prastiwi (2011) dan Seliamang (2015) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis pengaruh partisipasi anggaran secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; 2) menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; 3) menganalisis pengaruh pengendalian akuntansi secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; 4) menganalisis pengaruh sistem pelaporan secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; 5) menganalisis pengaruh desentralisasi secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; 6) menganalisis pengaruh pengawasan fungsional secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan; dan 7) menganalisis pengaruh budaya organisasi secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan.

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan penelitian agar dapat memperoleh gambaran yang jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Variabel Dependen  
Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah akuntabilitas kinerja keuangan (Y).
- b. Variabel Independen  
Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah:
  - 1) Partisipasi Anggaran ( $X_1$ )
  - 2) Kejelasan Sasaran Anggaran ( $X_2$ )
  - 3) Pengendalian Akuntansi ( $X_3$ )
  - 4) Sistem Pelaporan ( $X_4$ )
  - 5) Desentralisasi ( $X_5$ )
  - 6) Pengawasan Fungsional ( $X_6$ )
  - 7) Budaya Organisasi ( $X_7$ )

## TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Menurut Kennis (2009) "partisipasi anggaran adalah sebagai tingkat keikutsertaan manajer dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan". Oleh karena manajer tingkat bawah yang membuat anggaran, tujuan anggaran tampaknya akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer, yang menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Peningkatan tanggung jawab dan tantangan yang inherent dalam proses tersebut memberikan insentif non-uang yang mengarah pada tingkat kinerja yang lebih tinggi. Anggaran yang akan digunakan sebagaimana mestinya akan menjadi alat pembantu yang positif dalam menetapkan standar prestasi kerja, dalam mendorong tercapainya sasaran, dalam mengukur hasil, dan dalam mengarahkan perhatian pada bidang yang memerlukan penyelidikan.

Dalam penelitian Bangun (2009)

dan Mbon (2014) menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun dalam penelitian Retnaningtyas (2016) mengatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan partisipasi anggaran dengan akuntabilitas kinerja, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

$H_1$ : Partisipasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar.

### 2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Menurut Budi (2006) dalam Suwandi (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran itu dipahami oleh orang yang bertanggung jawab atas anggaran tersebut. Pada konteks pemerintah daerah, sasaran anggaran tercakup dalam rencana strategik daerah (Renstrada) dan program pembangunan daerah (Propeda). Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Bangun (2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis (1979) dalam Suwandi (2013) juga menyatakan bahwa anggaran tidak

hanya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

Putra (2013) dalam Primayoni, Adiputra, dan Sudjana (2014) menyatakan terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat akuntabilitas, seperti yang telah diungkapkan terhadap tingkat akuntabilitas, seperti yang diungkapkan dalam penelitian terdahulu oleh Anjarwati (2012), yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang. Yulianti, Hardi dan Rusli (2014) yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Palawan. Primayoni, Adiputra dan Sudjana (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub>: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

### **3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan**

Pengendalian merupakan suatu

proses melalui manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang ada alasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004) dalam Yulianti, Hardi, dan Rusli (2014).

Dalam penelitian Hidayattullah dan Herdjiono (2014) dan Yulianti dkk (2014) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Indraswari (2010) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009) berpendapat, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan pengendalian akuntansi dengan akuntabilitas

kinerja, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>3</sub>: Pengendalian akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar

#### 4. Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan merupakan suatu rangkaian laporan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang berhubungan dan saling ketergantungan satu sama yang lain. Indraswari (2010) dalam Retnaningtyas (2016) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009:161) berpendapat, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Dalam penelitian Anjarwati (2012) dan Retnaningtyas (2016) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan, namun demikian dalam penelitian Risma (2009) menunjukkan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan sistem pelapor-

an akuntabilitas kinerja maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>4</sub>: Sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

#### 5. Pengaruh Desentralisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Desentralisasi adalah proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan. Organisasi desentralisasi secara umum ditujukan dengan pengambilan keputusan yang terjadi dalam organisasi. Dalam sentralisasi yang baik sebagian keputusan diambil tingkat hirarki organisasi yang tertinggi dan apabila sebagian otorisasi didelegasikan pada level yang rendah dalam organisasi maka organisasi tersebut lebih desentralisasi.

Pemberlakuan desentralisasi memberikan keleluasaan bagi daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. Kebijakan pemerintah daerah dengan adanya otonomi diharapkan berpihak pada peningkatan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Agar otonomi daerah dapat berasosiasi positif dengan pembangunan daerah dan pelayanan publik memang sangat tergantung pada *policy design matters*, yang artinya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih pada pemerintah lokal dalam perencanaan, penganggaran, penetapan dan penerapan kebijakan dapat menghasilkan *good public policy*. Dalam penelitian Bangun (2009), Suwandi (2013), Wahyuni dkk (2014) dan Retnaningtyas (2016) menguji tentang pengaruh desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan, hasil menunjukkan bahwa desentralisasi berpengaruh pada akuntabilitas kinerja keuangan. Berdasarkan berbagai argu-

men serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan desentralisasi dengan akuntabilitas kinerja maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>5</sub>: Desentralisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## 6. Pengaruh Pengawasan Fungsional terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Akuntabilitas kinerja keuangan dapat terwujud dengan adanya pelaksanaan pengawasan fungsional yang efektif. Pada pemerintah daerah terdapat aparat pengawas fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditentukan. Tujuan dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memberikan dan menyajikan beberapa informasi yang diperlukan dan dimengerti oleh pihak yang berkepentingan terutama masyarakat. Pelaporan kinerja disini meliputi bagaimana kinerja yang dilakukan oleh pegawai sektor publik berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Wulandari (2013) dan Retnaningtyas (2016) menguji tentang pengaruh pengawasan fungsional dalam menunjang akuntabilitas publik pada pemerintah kota Padang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik yang artinya bahwa semakin baik pengawasan fungsional maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas publik. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan dengan hubungan desentralisasi dengan akuntabilitas kinerja, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>6</sub>: Pengawasan fungsional berpengaruh secara signifikan terha-

dap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## 7. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Triguno (2000) dalam Kurniawan dan Prastiwi (2011) berpendapat bahwa budaya organisasi adalah campuran nilai-nilai kepercayaan dan norma-norma yang ditetapkan sebagai pola perilaku dalam suatu organisasi. Menurut Nawawi (2003) yang dikutip dari Cushway B dan Lodge D, mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah suatu kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi falsafah utama yang dipegang teguh oleh anggota organisasi dalam menjalankan atau mengoperasionalkan kegiatan organisasi. Dari berbagai definisi budaya organisasi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi adalah sistem nilai-nilai yang diyakini oleh semua anggota perusahaan dan yang dipelajari, diterapkan, serta dikembangkan secara berkesinambungan, berfungsi sebagai sistem perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian Kusumawati (2014) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, namun demikian dalam penelitian Kurniawan dan Prastiwi (2011) dan Seliamang (2015) menunjukkan hasil bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Budaya organisasi berperan untuk menentukan arah organisasi, mengarahkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana mengalokasikan dan mengatur sumber daya organisasional maupun sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang yang datang dari lingkungan organisasi. Berdasarkan berbagai argumen serta bukti empiris yang berkaitan

dengan hubungan budaya organisasi dengan akuntabilitas kinerja, maka dapat diajukan hipotesis yaitu:

H<sub>7</sub>: Budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## METODE PENELITIAN

Objek dan lokasi dalam penelitian adalah pejabat struktural SKPD Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan dibatasi pada pejabat struktural SKPD karena yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan pengusulan anggaran serta pelaksanaan anggaran. Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural SKPD Badan atau Dinas yang terlibat pada proses penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2016 yang terdiri dari 22 SKPD dengan jumlah populasi 381 pejabat struktural. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *multistage sampling*. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *multistage sampling* atau secara bertahap berdasarkan kelompok dengan probabilitas yang sama. Menurut Sugiyono (2002:126) *multistage sampling* adalah pemilihan sampel yang dilakukan secara beberapa tahap dengan menggunakan unit sampling yang lebih kecil pada setiap tahapnya untuk mendapatkan calon responden yang diinginkan dengan probabilitas yang sama. Teknik ini melibatkan sampel terpilih dari setiap *cluster* yang dipilih yang tidak melibatkan semua unit yang terdapat dalam cluster tersebut.

Variabel akuntabilitas kinerja keuangan diukur dengan menggunakan indikator variabel, yaitu a) akuntabilitas kejujuran dan hukum, b) akuntabilitas proses, c) akuntabilitas program, d) akuntabilitas kebijakan dan e) akuntabilitas finansial. Variabel partisipasi anggaran diukur dengan indikator variabel, yaitu: a) keterlibatan, b) pengaruh dan c) komitmen. Me-

nurut Abdullah (2003) dalam Rida Fani Bulan (2011) indikator kejelasan sasaran anggaran yaitu: a) jelas, b) spesifik dan c) dapat dipahami. Yang termasuk indikator pengendalian akuntansi menurut Bambang Hartadi (2007:130) adalah a) pemisahan fungsi, b) prosedur pemberian wewenang, c) prosedur dokumentasi, d) prosedur dan catatan akuntansi, e) pengawasan fisik dan f) pemeriksaan intern secara berkala. Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), indikator dari sistem pelaporan ini antara lain, yaitu a) relevan, b) keandalan, dan c) dapat dibandingkan dan d) dapat dipahami. Menurut bangun (2009), agar pengukuran desentralisasi semakin baik ada indikator dalam desentralisasi yang mengacu ke Permendagri No. 13 tahun 2006 terdiri dari: a) Pemberian kewenangan dalam menentukan jumlah anggaran, b) Pemberian kewenangan dalam penentuan program dan kegiatan, c) Penunjukan kewenangan dalam menentukan keterlibatan pegawai, d) Peningkatan kewenangan dalam menentukan skala prioritas, dan e) Pemberian kewenangan dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai. Indikator keberhasilan pengawasan fungsional menurut Wasistiono (2010) di antaranya: a) meningkatnya disiplin, prestasi dan perkembangan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas; b) terciptanya keteraturan, keterbukaan dan kelancaran pelaksanaan tugas; c) meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d) menurunnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme; e) berkurangnya penyalahgunaan wewenang; dan f) berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar. Menurut Robbin (2008) indikator-indikator untuk mengukur budaya organisasi dalam penelitian ini, yaitu a) kedisiplinan, b) ketepatan, c) keramahan, d) ketanggapan, e) berkoordinasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dikembangkan dari penelitian Retnaningtyas (2016) yang diukur dengan menggunakan skala Likert.



Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode distribusi langsung (*direct distribution method*) yaitu mendatangi para responden secara langsung untuk menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner. Untuk menguji kualitas data dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan *Product Moment Pearson* dan *Cronbach's Alpha*. Uji asumsi klasik, dilakukan melalui 4 (empat) uji yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda, uji t, Uji F dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

## HASIL PENELITIAN

### Karakteristik Responden

Hasil identifikasi responden penelitian dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Berdasarkan data tersebut, responden yang berjenis kelamin laki-laki sejumlah

120 orang (61,54%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 75 orang (38,46%). Responden yang memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana) sejumlah 81 orang (41,54%), Strata 2 (Master) sejumlah 114 orang (58,46%), sedangkan yang mempunyai pendidikan terakhir Diploma (D3) dan Strata 3 (Doktor) tidak ada. Responden yang menduduki jabatan sebagai Kepala Badan/Dinas/Instansi sejumlah 5 orang (3,08%), Sekretaris/Kabid/Kabag sejumlah 50 orang (25,64%) dan Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie sejumlah 139 orang (71,28%). Responden yang telah lama bekerja antara 1 – 5 tahun tidak ada, lama bekerja 6 – 10 tahun sejumlah 1 orang saja (0,51%), lama bekerja 11 – 15 tahun sejumlah 4 orang (2,05%), lama bekerja 16 – 20 tahun sejumlah 25 orang (12,82%) dan lama bekerjanya lebih dari 21 tahun sejumlah 165 orang (84,62%).

**Tabel 1: Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	120	61,54
Perempuan	75	38,46
Jumlah	195	100,00
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
Diploma (D3)	0	0
Strata 1 (Sarjana)	81	41,54
Strata 2 (Master)	114	58,46
Strata 3 (Doktor)	0	0
Jumlah	195	100,00
<b>Jabatan</b>		
Kepala Badan/Dinas/Instansi	5	3,08
Sekretaris/Kabid/Kabag	50	25,64
Kasubid/Kasubbag/Kasubdis/Kasie	139	71,28
Jumlah	195	100,00
<b>Lama Bekerja</b>		
1 – 5 Tahun	0	0,00
6 – 10 Tahun	1	0,51
11 – 15 Tahun	4	2,05
16 – 20 Tahun	25	12,82
21 Tahun	165	84,62
Jumlah	195	100,00

Sumber: Data primer diolah, 2016

### Hasil Uji Instrumen Penelitian

Berdasarkan *output* program SPSS, semua item pertanyaan yang digunakan pada variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional, budaya organisasi dan akuntabilitas kinerja ke-

uangan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian karena *probability value* < 0,05 dan dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien *cronbach's alpha* lebih dari 0,60; uji validitas dan uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 2: Hasil Uji Instrumen Penelitian**

Uji instrumen Penelitian	Hasil Uji	Kesimpulan
<b>Uji Validitas</b>		
	<b>Pearson Correlation</b>	
Partisipasi Anggaran	0,371; 0,394; 0,564; 0,718; 0,380; 0,784; 0,534	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,626; 0,665; 0,514; 0,642; 0,662	Valid
Pengendalian Akuntansi	0,750; 0,680; 0,399; 0,731; 0,690; 0,304	Valid
Sistem Pelaporan	0,826; 0,582; 0,792; 0,750	Valid
Desentralisasi	0,540; 0,668; 0,532; 0,516; 0,598; 0,647	Valid
Pengawasan Fungsional	0,857; 0,656; 0,470; 0,596; 0,822; 0,275; 0,802; 0,850	Valid
Budaya Organisasi	0,566; 0,526; 0,489; 0,406; 0,836; 0,627	Valid
Akuntabilitas kinerja keuangan	0,600; 0,416; 0,302; 0,277; 0,560; 0,541; 0,629; 0,790; 0,552; 0,342; 0,358	Valid
<b>Uji Reliabilitas</b>		
	<b>cronbach's alpha</b>	
Partisipasi Anggaran	0,608	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,605	Reliabel
Pengendalian Akuntansi	0,660	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,699	Reliabel
Desentralisasi	0,606	Reliabel
Pengawasan Fungsional	0,841	Reliabel
Budaya Organisasi	0,604	Reliabel
Akuntabilitas kinerja keuangan	0,667	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2016

**Tabel 3: Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	<i>Tolerance</i> (0,595; 0,939; 0,933; 0,600; 0,979; 0,329; 0,985) > 0,10 dan VIF (1,681; 1,065; 1,072; 1,667; 1,021; 3,038; 1,016) < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p (0,144) > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p (0,270; 0,452; 0,307; 0,818; 0,662; 0,857; 0,190) > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	p (0,315) > 0,05	Residual normal

Sumber: Data primer diolah, 2016

### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik semua variabel dalam penelitian inidinyatakan lolos uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas seperti pada tabel 3 di atas:

### Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya organisasi) terhadap variabel terikat (akuntabilitas kinerja keuangan). Rumusnya yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

Dengan alat bantu komputer program SPSS versi 13, hasil analisis selengkapnya disajikan dalam tabel 4 berikut:

Berdasarkan tabel 4 diperoleh persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$Y = 37,532 + 0,047 X_1 + 0,189 X_2 + 0,278 X_3 + 0,002 X_4 - 0,048 X_5 + 0,257 X_6 + 0,246 X_7$$

### Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Hasil uji koefisien regresi parsial (uji t) dapat dilihat dari tabel 5 di bawah ini:

Dari tabel 5 hasil uji t menunjukkan nilai  $p1 = 0,643 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel partisipasi anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p2 = 0,041 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p3 = 0,026 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengendalian pelaporan terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p5 = 0,065 > 0,05$  akuntansi terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p4 = 0,992 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel sistem

**Tabel 4: Regresi Linear Berganda**

Variabel	Koefisien	Nilai t	Signifikansi
(Constant)	37.532	7.946	0,000
Partisipasi Anggaran	0,047	0,264	0,643
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,189	2.065	0,041
Pengendalian Akuntansi	0,278	2.129	0,026
Sistem Pelaporan	0,002	0,010	0,992
Desentralisasi	-0,048	-0,449	0,065
Pengawasan Fungsional	0,257	1,260	0,021
Budaya Organisasi	0,246	2,130	0,035
F	14.536		0,002
Adjusted R <sup>2</sup> :	0,614		

Sumber: Data primer diolah, 2016

**Tabel 5: Pengujian Signifikansi Secara Parsial**

Pengaruh	p	Nilai t	Kesimpulan
X <sub>1</sub> thd Y	0,643	0,264	X <sub>1</sub> berpengaruh tidak signifikan terhadap Y
X <sub>2</sub> thd Y	0,041	2,065	X <sub>2</sub> berpengaruh secara signifikan terhadap Y
X <sub>3</sub> thd Y	0,026	2,129	X <sub>3</sub> berpengaruh secara signifikan terhadap Y
X <sub>4</sub> thd Y	0,992	0,010	X <sub>4</sub> berpengaruh tidak signifikan terhadap Y
X <sub>5</sub> thd Y	0,065	-0,449	X <sub>5</sub> berpengaruh tidak signifikan terhadap Y
X <sub>6</sub> thd Y	0,021	1,260	X <sub>6</sub> berpengaruh secara signifikan terhadap Y
X <sub>7</sub> thd Y	0,035	2,130	X <sub>7</sub> berpengaruh secara signifikan terhadap Y

Sumber: Data primer diolah, 2016

maka  $H_0$  diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel desentralisasi terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p_6 = 0,021 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel pengawasan fungsional terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan; nilai  $p_7 = 0,035 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan variabel budaya organisasi terhadap variabel akuntabilitas kinerja keuangan.

Hasil uji F ditunjukkan pada tabel 4 dengan nilai sig sebesar 0,002 maka  $H_0$  ditolak, berarti model yang digunakan untuk menguji variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah tepat, dengan demikian bahwa pemilihan variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya organisasi sebagai prediktor dari akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar sudah tepat.

Hasil uji koefisiensi determinasi pada tabel 4 diketahui besarnya adjusted  $R^2$  sebesar 0,614. Besarnya sumbangan pengaruh variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar 61,4% sisanya sebesar 38,6% (100% - 61,4%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Artinya, variasi variabel akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar dijelaskan oleh variasi variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, desentralisasi, pengawasan fungsional dan budaya organisasi sebesar 61,4%, sisanya 38,6% dijelaskan oleh variabel di luar model yang diteliti.

## PEMBAHASAN

1. Pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan hal tersebut maka partisipasi anggaran sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja keuangan, maka kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan melibatkan semua unsur dalam penyusunan anggaran di mana bawahan/pelaksana anggaran diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh dalam proses penyusunan anggaran. Kesempatan yang diberikan diyakini dapat meningkatkan pengendalian dan rasa keterlibatan di kalangan bawahan/pelaksana anggaran.

2. Pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat struktural di Kabupaten Karanganyar telah menetapkan anggaran secara jelas dan spesifik dengan tujuan sehingga dapat dimengerti orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran. Akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari kejelasan

sasaran anggaran. Kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan menekankan pada semua aparat pemerintahan dalam menyusun anggaran agar sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai kabupaten Karanganyar yang tercakup dalam Rencana Strategik Daerah (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Pro-peda).

3. Pengaruh variabel pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat struktural di Kabupaten Karanganyar memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pengendalian akuntansi, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pejabat struktural di Kabupaten Karanganyar memiliki peran serta masing-masing sesuai dengan bidangnya. Kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan mewajibkan semua SKPD untuk melakukan pengendalian manajemen keuangan masing-masing dengan memanfaatkan sistem akuntansi yang telah ada dalam program SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) pada SKPD masing-masing.

4. Pengaruh variabel sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan sistem pelaporan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat struktural

di Kabupaten Karanganyar memiliki pemahaman yang tinggi terhadap sistem pelaporan, namun hanya mengandalkan pada sistem informasi yang telah ada, dalam hal ini Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), maka kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan mewajibkan semua SKPD untuk memiliki sistem pelaporan yang baik serta kesesuaian laporan dengan fakta di lapangan karena pemerintah kabupaten berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan ataupun informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

5. Pengaruh variabel desentralisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar

Hasil penelitian menunjukkan desentralisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendelegasian tanggung jawab pada SKPD belum sesuai dengan bidang masing-masing SKPD dalam proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan belum terlaksana dengan maksimal, selain itu pemahaman terhadap desentralisasi antara satu pejabat dengan pejabat yang lain adalah tidak sama, maka kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan mendelegasikan tanggung jawab pada SKPD sesuai dengan bidang masing-masing sehingga SKPD mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam proses penentuan kegiatan, penentuan nilai, penentuan

orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan, menentukan prioritas program dan kegiatan.

6. Pengaruh variabel pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar  
Hasil penelitian menunjukkan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat struktural di Kabupaten Karanganyar memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pengertian pengawasan fungsional namun pemahaman terhadap pengawasan fungsional antara satu pejabat dengan pejabat yang lain berbeda-beda sesuai peran serta masing-masing, maka kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan menunjuk Inspektorat daerah sebagai lembaga intern daerah dalam pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan yang efektif. Semakin baik pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja keuangan daerah.

7. Pengaruh variabel budaya organisasi terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar  
Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Pejabat struktural di Kabupaten Karanganyar memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pengertian budaya organisasi dan pemahaman terhadap budaya organisasi antara satu pejabat dengan pejabat yang lain berbeda-beda sesuai peran serta masing-masing, dengan demikian kebijakan yang harus diambil dalam upaya meningkatkan akuntabili-

tas kinerja keuangan di Kabupaten Karanganyar adalah dengan mewajibkan semua aparat pemerintahan untuk selalu mentaati peraturan yang berlaku dan memberikan sanksi pada setiap pelanggaran yang terjadi dalam organisasi pemerintahan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian setiap hipotesis, diperoleh kesimpulan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti bahwa partisipasi anggaran meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan akan menurun. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan juga meningkat.

Pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti bahwa pengendalian akuntansi meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan juga meningkat. Sistem pelaporan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti sistem pelaporan meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan akan menurun.

Desentralisasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti bahwa desentralisasi meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan akan menurun. Pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini berarti bahwa pengawasan fungsional meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan akan mening-

kat. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini

berarti bahwa budaya organisasi meningkat maka akuntabilitas kinerja keuangan akan meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Universitas Sumatra Utara.
- BPKP. 2011, *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Keenam. Bogor: Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengawasan BPKP.
- Darwanis, Chairunnisa. 2013, *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli.
- Hidayat, 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, struktur Desentralisasi dan Locus of Control terhadap Kinerja Manajerial*. Akuntabilitas Vol. VIII No. 2 Agustus.
- Mbon, Fladimir Edwin. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*. Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas atma Jaya Yogyakarta.
- Milani, K.R. 2005. *The relationship of participation in budget setting to industrial supervisor performance and attitude*, The Accounting Review, Vol. 50 No.2, pp. 274-84
- Netty, Herawati. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Seri Humaniora, *Jurnal*. Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. Mendalo Darat: Jambi.
- Primayoni. Ni Kadek Rina, Adiputra, Sujana, 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *E- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 Volume 2 No: 1*.
- Retnaningtyas, Theresia Wahyu. 2016. *Analisis Akuntabilitas Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rivai dan Mulyadi. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robbins SP, dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siegel, G dan H.R. Marconi Boulian. 2009. *Behavioral Accounting*. Cincinnati. Ohio. South-Western Publishing Co.
- Setiaji, Bambang. 2006. *Panduan Riset dengan Pendekatan Kuantitatif*. Surakarta: UMS Press.
- Triguno. 2004. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Wulandari, Indah. 2009. *Pengaruh Pengawasan Fungsional dalam menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Padang*. Artikel. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Wulandari, Risma Putri. 2009. *Pengaruh Kejelasan Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Artikel. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.